

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas tugas dan Fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekaligus sebagai alat kendali untuk memacu meningkatkan kinerja di lingkungan Dinas Peradagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama tahun 2020, yang hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan ditahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Flores Timur tahun 2019 dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme;

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0150)
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah kabupaten Flores Timur,

14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.
15. Peraturan Bupati Flores Timur 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur TA 2021 Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.00/01/2021
17. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2021;

C. Gambaran Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang memiliki Tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber daya Mineral.

I. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian.

II. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
2. Pembinaan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

3. Pengsinkronisasian penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasikan kegiatan program sektor dan perdagangan industri dibidang pengembangan industri kimia, industri hasil pertanian, hasil hutan, logam, mesin, elektronik, aneka industri kecil dan dagang kecil, perdagangan dalam negeri/luar negeri dan kemetrolagian.
5. Memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan, kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten/kota.
6. Memfasilitasi perlindungan konsumen, baik sebagai pengguna maupun pengusaha akan kebenaran ukuran dalam transaksi dagang.
7. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar industri di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memfasilitasi bimbingan dan usaha perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor.
9. Memfasilitasi pemberdayaan potensi sumber daya industri di Flores Timur.
10. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja terdiri dari 1 (satu) eselon II, 1 (satu) eselon IIIa, 3 (tiga) eselon IIIb yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dan 9 (sembilan) eselon IV, sedangkan Data Personalia berdasarkan jumlah, kompetensi pendidikan formal, golongan / kepangkatan, dan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur pada awal Tahun 2021 sebanyak 22 orang, mutasi pegawai keluar sebanyak

2 orang, mutasi pegawai masuk 2 orang, sehingga pada akhir Tahun 2021 jumlah pegawai sebanyak 22 orang, dengan perincian :

- PNS Organik : 22 orang
- Tenaga Kontrak : 29 orang
- Jumlah : 51 orang

b. Kompetensi Pegawai

Gambaran Kompetensi Aparatur dari unsur PNS Organik dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1

Menurut Tingkat Pendidikan Formal :

No Urt.	Jenis Kelamin	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	SARMUD/ DIPLOMA	S1	S2	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Laki-laki	2	2	4	2	11
2.	Perempuan	3	1	7	-	11
	Jumlah	5	3	12	2	22

Tabel 2

Menurut Golongan / Kepangkatan :

No Urt.	Jenis Kelamin	Golongan / R. Gaji				Jumlah
		I	II	III	IV	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Laki-laki	-	-	8	3	11
2.	Perempuan	-	1	9	1	11
	Jumlah	-	1	17	4	22

Tabel 3

Menurut Pendidikan Penjenjangan :

No	Jenis kelamin	Pim. II	Pim. III	Pim. IV	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Laki-laki	-	2	2	4
2.	Perempuan	-	-	2	2
	Jumlah	-	2	4	6

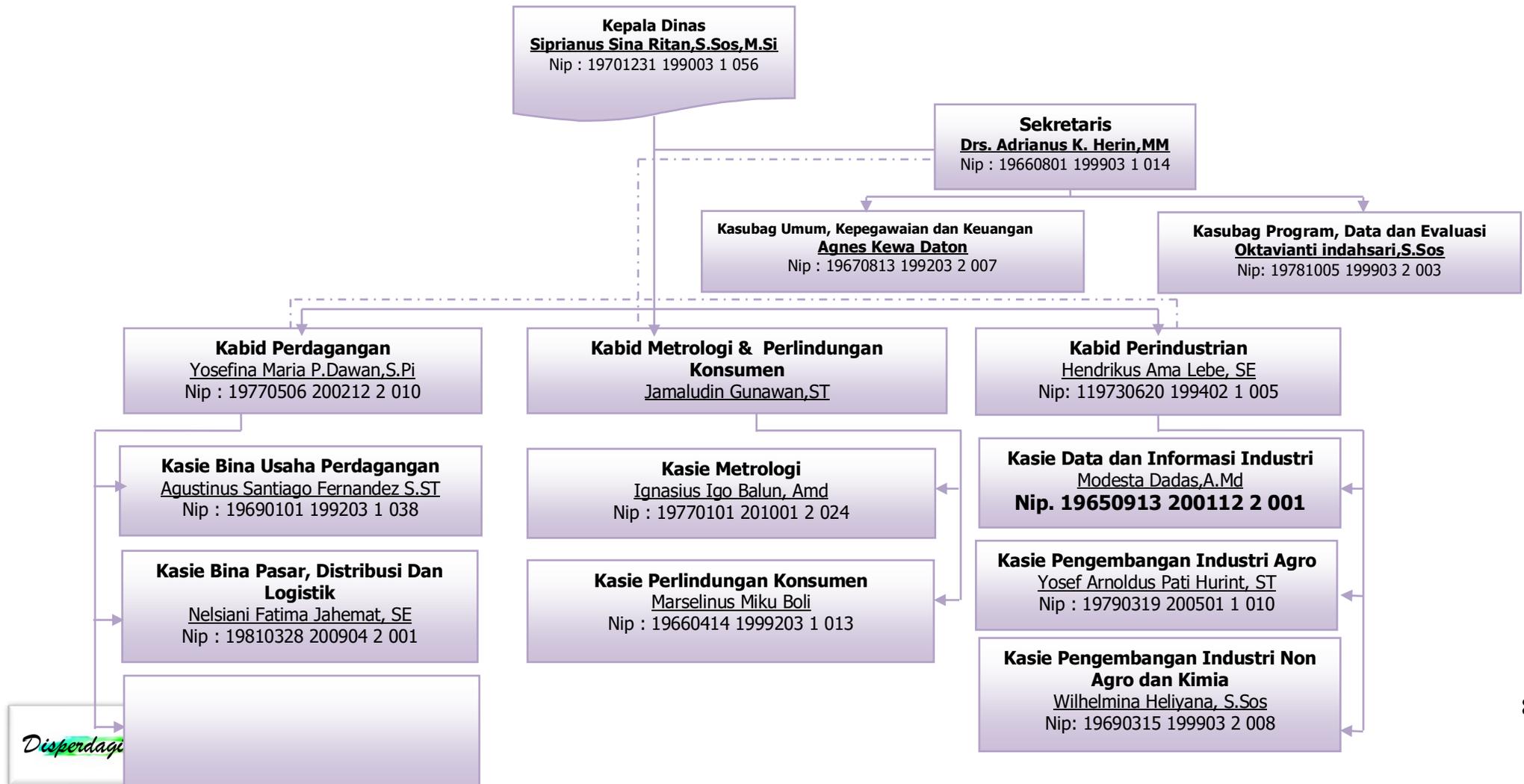
Tabel 4

Menurut Jabatan Struktural / Eselonering :

No	Jenis kelamin	Eselon				Jumlah (Formasi)	Ket
		II.a	III.a	III.b	IV.a		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laki-laki	1	1	2	4	8	Formasi Terisi : 15
2.	Perempuan	-	-	1	5	6	
	Jumlah	1	1	3	9	15	15



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR



E. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas selama 5 (lima) tahun yang diidentifikasi dari berbagai sumber serta dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di Tingkat Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan memperhatikan kondisi nyata di masyarakat termasuk juga kemungkinan kondisi dimasa yang akan datang.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Identifikasi permasalahan dan hambatan memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan. Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagin	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya staf Perdagin yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, magang maupun pendidikan formal bidang Industri, Perdagangan dan Metrologi 	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat eselon II dan III minimal berpendidikan Strata 1 Pejabat, staf Perdagin minimal mengikuti Diklat – diklat yang berkaitan dengan bidang – bidang Industri, Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya sistem pengembangan SDM yang terintegrasi dan konsisten Belum adanya Tenaga fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan jumlah PNS lingkup Pemkab Flotim Rendahnya respon terhadap pengembangan kapasitas aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur
Ketersediannya dana bagi pengembangan IKM	Terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan untuk pengembangan	Pagu anggaran yang diajukan berdasarkan kajian anggaran sebelumnya	Kurangnya Program dan Kegiatan baru yang direncanakan oleh	Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk kabupaten pada setiap tahun	Terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan untuk pengembangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Industri Kecil dan Menengah		Dinas Perdagangan	anggaran	Industri Kecil dan Menengah
Pembinaan, Pengembangan IKM dan pelaku usaha Perdagangan	Pembinaan belum maksimal Sesuai standar pelayanan	Pelayanan yang kontinue dan berkesinambungan	Terbatasnya dana pendampingan kepada IKM dan para Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rendahnya kesadaran dan kualitas pelaku IKM dan pelaku usaha dagang ➢ Terbukanya peluang pasar / persaingan bebas 	Terbatasnya sarana penunjang lainnya

Daya saing produk daerah dengan produk dari luar daerah	Rendahnya daya saing produk daerah terhadap produk dari luar / produk import	Kualitas dan berbagai persyaratan teknis produk seperti SNI,HAKI,ISO,Label Halal,	Pemanfaatan mesin dan peralatan bantuan bagi kelompok IKM yang tidak optimal	Rendahnya inovasi produk dan kreasi Para pelaku pasar dalam menarik minat dan daya beli masyarakat baik lokal maupun luar daerah	Terbatasnya dana pendampingan kepada IKM dan bagi para Pelaku Usaha
Perlindungan konsumen dari peredaran barang kadaluarsa	Masih ditemukan sejumlah barang – barang yang telah habis masa berlakunya kadaluarsa	adanya aturan /Perda yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan peredaran barang. sehingga membuat efek jerah bagi yang melakukan pelanggaran	Belum optimal Pengawasan dan Pemeriksaan dari Instansi terkait	Kelalaian dari para pelaku pasar / dengan sengaja menjual produk kadaluarsa	Pengawasan barang beredar sesuai UU no 23 tahun 2014 dikembalikan / diserahkan kepada pemerintah Provinsi
Peningkatan kesadaran bagi para pelaku pasar untuk melakukan Tera – tera ulang Peralatan UTTPnya	Banyak peralatan UTTP seperti timbangan / dacing, takaran basah , takaran lainnya belum ditera	Peralatan UTTP harus berlogo Tera Ulang dan berkode tahun berjalan dari kemetrolagian	Belum optimalnya tingkat Pengawasan dari Dinas	Belum ada Kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk melakukan tera- tera ulang peralatan UTTP	Peralatan Standar kemetrolagian belum lengkap dan Para penera belum mempunyai SIM sebagai Pegawai Berhak dalam melakukan Tera – tera ulang

Tabel 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peluang Eksport Komoditi Unggulan masih tinggi	Adanya Regulasi di bidang eksport atas barang komoditi unggulan daerah	Permintaan pasar atas komoditi unggulan daerah meningkat	
2	Nilai pasar komoditi olahan lebih tinggi dari gelondongan	Industri pengolahan akan bertumbuh dan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditi	
3	Pasar Global	Kebijakan di bidang Import	ACI dan penggunaan barang produksi dalam negeri	
4	Komoditi yang telah dinotifikasi ke WTO	SNI	Perlindungan konsumen dari barang – barang non SNI	

F. Tujuan Dan Manfaat Lakip

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan MenPAN RB No. 29 Th.2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2021 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

- Menginventarisir seluruh program dan kegiatan SKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan dari aspek realisasi fisik dan keuangan yang terserap dalam pelaksanaannya.
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) disesuaikan dengan kerangka penyusunan LAKIP yang baku dengan disertai indikator-indikator penjelasan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga keberhasilan pelaksanaannya dapat terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Pemerintah kabupaten Flores Timur

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**, Penjelasan Makna visi Bupati Flores Timur sebagai penjabaran dari gagasan dan tema sentral kepemimpinan politik dan Presfektif Pembangunan

B. Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi dirumuskan dalam usaha mencapai visi adalah :

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur

Dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat Mengatualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

Dimaksudkan agar Pembangunan Flores Timur Lima Tahun Kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang menjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur

Dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktifitas dan nilai ekonominya.

4. Selamatkan laut Flores Timur

Dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara tekosistem dan potensinnya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

5. Reformasi Birokrasi

Dimaksudkan agar terwujudnya pemerintah yang berdasarkan pada Good Gavernance dan Clean Goverment.

C. Tujuan dan sasaran

Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Terselamatnya orang muda dari masalah ekonomi
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi tanaman rakyat
3. Terpeliharanya potensi laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kemandirian orang muda
- 2) Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah
- 3) Meningkatnya potensi perikanan

E. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan Program-program. Pada Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Kebijakan dan program yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“Terselamatnya orang muda dari masalah ekonomi, meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman rakyat dan terpeliharannya potensi laut”

Tabel 3. Tujuan dan sasaran

Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Keg
Bidang Industri			
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produk dan produktifitas sektor industri kecil dan menengah di Kab. Flotim • Meningkatnya produk dan produktifitas komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing industri. • Menggalakkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditi rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Indusri dan Peran serta Masy
Bidang Perdagangan			
<p>Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam dan luar negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang. • Pengembangan pasar dalam dan luar negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sisten jaringan informasi perdagangan 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan / Penyediaan Saran Distribusi Perdagangan 1. Menjamin ketersediaan barang keb pokok dan barang penting di tingkat darah kab/kota / Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat

2. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota /

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kab/Kota

- Perlindungan konsumen dan pasar tradisional

1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan / Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera – tera ulang

F. Faktor penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas
2. Sumber Daya Alam
3. Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
4. Kebijakan Industri dan Perdagangan
5. Pemberian kemudahan Ijin Usaha

G. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 serta berdasarkan APBD tahun 2021 disusun Perjanjian Kinerja tahun 2021 (terlampir) yang telah disesuaikan dengan Dokumen Renstra dan rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 4 Rencana Kinerja Tahunan



**RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Lampiran 2

SKPD : Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Flores Timur

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Komunikasi, sumber air dan Listrik yang disediakan Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani perijinan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor Tersedianya Bahan Bacaan Perundang-Undangan Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Tamu dan Rapat Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan



		Jumlah dokumen perencanaan, pengandaian dan evaluasi kinerja dan keuangan OPD Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	7 dok 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
2.	Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	Terselenggaranya Pengawasan Terhadap Barang Beredar Terlaksananya Kegiatan Sidang Tera Tera Ulang Peralatan UTTP Setiap Tahun Tersedianya Gedung Pasar dan Sarana penunjang Lainnya Jumlah Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang di bina Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Tersedianya Data Base Perdagangan Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya	19 Kali 12 Jenis / 19 kec 4 Pasar 100 % 19 Kecamatan 1 Dokumen 19 kec
3.	Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	Tercapainya Pelayanan Teknologi industri	Kel IKM (19 Kec)

H. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik karena melalui Perjanjian kinerja terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1.	Terevaluasinya pelaksanaan program kegiatan SKPD	Tersedianya jasa surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan
		Tersedianya Jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perijinan	7 Unit	12 Bulan
		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
		Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	14 Bulan	12 Bulan
		Tersedianya Alat Tulis kantor	30 Jenis	12 Bulan
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	30000lembar	12 Bulan
		Tersedianya Kompnen Instalasi listrik Penerangan bangunan Kantor	10 komponen	12 Bulan
		Tersedianya Bahan Bacaan Perundang - Undangan	2 Jenis	12 Bulan
		Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Tamu dan Rapat	500 OM	12 Bulan
		Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	44 Kali	12 Bulan
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan
		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	12 Bulan
		Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional	3 Unit	12 bulan
3	Administrasi dan pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian evaluasi kinerja keuangan OPD	8 dok	12 Bulan
4	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dari peredaran barang terhadap pelaku usaha	Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar	4 Kec	12 Bulan
		Terlaksananya Kegiatan Sidang Tera- Tera Ulang Peralatan UTTP Setiap Tahun	4 Kec	12 Bulan
	Meningkatnya sarana perdagangan yang layak dan bersih bagi pedagang kecil dan menengah	Jumlah Organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	95%	12 Bulan

	Tersedianya Sistem dan Informasi Perdagangan	Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya	8 Kec	12 Bulan
	Tersedianya data potensi unggulan daerah kab Flotim	Tersedianya system jaringan informasi perdagangan	1 kali	12 Bulan
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas sektor IKM	Jumlah IKM yang Terfasilitasi	25 Kel	12 Bulan
	Meningkatnya kemampuan teknologi industri	Tercapainya Pelayanan Teknologi Industri	15 Kel	
		Terbinanya dan Tertatanya Kelompok IKM	15 Kel	
		Jumlah IKM yang ditata strukturnya	7 Kel	

Tabel 6
Perbandingan Pagu Sebelum Perubahan dengan Pagu Setelah Perubahan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.2.280.891.777	Rp. 2.237.212.083
2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 224.549.600	Rp. 26.701.000
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.1.529.075.000	Rp. 1.364.311.500
4.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 67.880.000	Rp. 41.030.000
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 44.380.000	Rp. 19.450.000
6.	Perencanaan dan pembangunan Industri	Rp. 890.282.500	Rp. 225.680.000
Jumlah		Rp.5.037.058.877	Rp. 3.916.384.583

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANSISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{\text{Rp. 3.916.384.583}}{\text{Rp. 3.223.622.264}} \times 100 \% \\ &= 82,31 \% \end{aligned}$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 – 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 – 75	Baik
4.	CC	➤ 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Indikator kinerja menunjukkan nilai 82,31 % rentang nilai berada di antara 75 - 85 menunjukkan interpretasi sangat baik, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah memuaskan.

Dalam tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian orang muda
2. Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah
3. Meningkatkan Potensi perikanan

Pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 terbagi atas 3 Belanja yaitu Belanja Program SKPD dan Belanja Urusan Perindustrian dan Belanja Urusan Perdagangan. Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan indikator kerjanya adalah Input, Ouput, dan Outcomes dapat dijelaskan per program sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan hingga akhir tahun 2021. Adapaun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem jaringan Informasi Perdagangan

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 kali (1 kec)

Realisasi : 1 kali (1 kec)

Capaian Kinerja : 100%

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Informasi Perdagangan

Kegiatan ini dilakukan Sosialisasi Tol Laut agar masyarakat/ pelaku usaha dapat memanfaatkan jasa Tol Laut. Keberadaan Tol Laut ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi penurunan disparitas harga, menjaga ketersediaan barang pokok dan barang penting di daerah serta memacu layananan logistic insvestasi daerah dan tumbuhnya muatan balik dari daerah.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

2.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Pasar

Realisasi : -

Capaian Kinerja : 0 %

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya, sesuai dengan perencanaan awal dalam TA 2021 kegiatan Pembangunan dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan akan di bangun rabat jalan pasar Waiwerang tidak dapat dilakukan pengerjaannya karena anggaran yang sedianya untuk peruntukan kegiatan dialihkan untuk penanganan covid 19 oleh Pemerintah Kabupaten.

2.2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target : 95%
 Realisasi : 36% (40) PKL
 Capaian Kinerja : 36%

Dengan capaian kinerja sbb :

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah Jumlah organisasi/pedagang kaki lima dan asongan yang dibina. Kegiatan ini dilakukan untuk membina para PKL dan meminimalisir pemasalahan yang diakibatkan oleh PKL agar terjaganya kebersihan, keindahan dan ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan di kota Larantuka, dikarenakan Keberadaan PKL sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti penggunaan fasilitas umum untuk berjualan yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan. Terdata Jumlah PKL yang ada di Kota Larantuka sebanyak 104 PKL dan yang di bina pada tahun 2021 sebanyak 40 PKL.

3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

3.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1Kali
 Realisasi : 0
 Capaian Kinerja : 0

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang tera tera ulang di 12 kecamatan / 12 kali sesuai target awal yang kemudian menjadi 1 kali karena mengalami refocusing sehingga Ketersediaan anggaran yang ada untuk kegiatan ini hanya disediakan untuk Biaya Jasa Kalibrasi peralatan standar, Belanja pemeliharaan alat reparatir dan biaya cetak dan penggandaan stiker dan sertifikat hasil pengujian. Pada tahun 2021 tidak ada ketersediaan anggaran untuk kegiatan Sidang Tera sesuai target yang ada. Namun langkah yang diambil oleh Dinas untuk dapat mencapai target penerimaan yang

telah ditetapkan adalah dengan cara melakukan pelayanan Sidang tera tera ulang di Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Potensi peralatan UTTP sebanyak 1.915 buah, melalui pelayanan UML tahun 2021 hanya melayani sebanyak 17 buah peralatan UTTP sehingga penerimaan sangat kecil. Melalui SDM tenaga Penera yang dimiliki maka dilakukan pelayanan Tera/tera ulang di tempat terpasang UTTP yaitu SPBU : 30 nosel, AMP (Aspal Mixing Plant) 10 buah, TUM (Tengki Ukur Mobil) 25 buah, meter arus pertamina sebanyak 2 buah, dari pelaksanaan ini diperoleh penerimaan sebesar Rp. 20.710.000,- yang sumbernya di dapat dari pihak ke tiga.

4. Program Stabilisasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4.1. Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 4 kali
 Realisasi : 10 kali
 Capaian Kinerja : 250%

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar kadaluarsa, target awal untuk kegiatan ini dilakukan di 19 kecamatan namun setelah refocusing target kegiatan ini menjadi 4 kali / di 4 kecamatan, namun dalam pelaksanaan dilakukan 10 kali di 10 kecamatan (Kec. Larantuka, Wulanggintang, Adobar, Adotim, Adonara, Soltim, Solsel, Ile Mandiri, Depog dan Ile Boleng) dengan mengurangi jumlah petugas yang turun ke lokasi dalam melakukan pengawasan, akan tetapi hasil yang dicapai kurang maksimal karena personil yang terbatas maka pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh tempat usaha baik toko maupun kios yang ada di wilayah sasaran pengawasan ini dilakukan.

4.2. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting

Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kab/Kota

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 38 kali

Realisasi : 38 kali

Capaian Kinerja :100%

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya. Dilakukan gelar operasi pasar murah bersubsidi di 19 kecamatan 2 kali putaran. Bekerjasama dengan Perum Bulog Larantuka, semua kegiatan berjalan dengan baik. Komoditi yang disediakan adalah beras jagung, sorgum beras, sereal sorgum, minyak goreng lokal. Sedangkan logistic yang disediakan oleh Bulog adalah beras medium gula pasir dan kacang hijau.

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

5.1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

5.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 13 IKM

Realisasi : 17 IKM

Capaian Kinerja : 76,47 %

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terfasilitasinya IKM. Dalam tahun 2021 kegiatan teknis di bidang yang dapat dilaksanakan hanya pendampingan pelatihan madu hutan, VCO dan Garam sedangkan aspirasi dewan dapat terfasilitasi beberapa IKM melalui pemberian bantuan Modal usaha untuk kelompok Seni Tawan Desa Hinga yang bergerak pada usaha mebel dan pengolahan IKM, Pemberian Modal usaha berupa uang kepda kelompok RIZKY Desa Terong yang bergerak pada usaha Batu Bata, Bantuan bahan tenun berupa benang pada 14 kelompok tersebar di 3 Desa Redontena, Mangaaleng, Adobala dan juga bantuan kepada Dekranasda kabupaten Flores Timur .

6. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Target : 7 Dokumen

Realisasi : 7 Dokumen

Realisasi kinerja : 100%

Tersedianya Laporan capaian Kinerja dan Keuangan OPD berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RKA, Data Kepegawaian dan Laporan keuangan.

6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

6.3. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2. Penyediaan Logistik Kantor

Target : 35 Jenis, 14 Jenis, 12 Jenis

Realisasi : 100%

Capaian Kinerja : Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya jasa kebersihan dan tersedianya peralatan kantor.

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target : 18.750 lembar

Realisasi : 18.750 lembar

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan perundang Undangan

Target : 2 Jenis

Realisasi : 1 Jenis

Capaian Kinerja : 50 %

Tersedianya Bahan bacaan (Pos Kupang)

5. Fasilitasi Kunjungan tamu

Target : 134 Porsi

Realisasi : 134 Porsi

Capaian Kinerja : 100 %

Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu

6. Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 38 kali

Realisasi : 38 kali

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

6.2 Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan

Capaian Kinerja : 100 %

Tersedianya jasa surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 12 Bulan

Realisasi : 12 Bulan

Capaian Kinerja : 100 %

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan

3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Target : 29 orang/bulan

Realisasi : 29 orang/bulan

Capaian Kinerja : 100 %

Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

6.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Target : 7 unit, 3 unit

Realisasi : 7 unit, 3 unit

Capaian Kinerja : 100 %

Kendaraan Dinas yang dilayani perizinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas.

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 1 Unit

Realisasi : 1 Unit

Capaian Kinerja : Terpeliharanya gedung kantor

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 16 unit

Realisasi : 16 unit

Capaian Kinerja : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

7. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

(dapat dilihat pada tabel dibawah ini)

8. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ;

(dapat dilihat pada tabel dibawah ini)



No	Program / Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja												Realisasi 2020	Target Realisasi terhadap Renstra
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dalam menunjang kelancaran OPD	12	945.941.000	12	600.920.000	12	661.012.000	12	727.113.200	12	799.824.520	12	3.734.810.720	98,6%	60,17
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	5.500.000	12	4.750.000	12	5.225.000	12	5.747.500	12	6.322.250	12	27.544.750	69,5%	60,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12	41.600.000	12	36.840.000	12	40.524.000	12	44.576.400	12	49.034.040	12	212.574.440	78,5%	60,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	12	2.475.000	12	3.550.000	12	3.905.000	12	4.295.500	12	4.725.050	12	18.950.550	91,9%	62,07
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administarsi Keuangan	12	35.810.000	12	35.700.000	12	39.270.000	12	43.197.000	12	47.516.700	12	201.493.700	98,9%	60,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	12	1.550.000	12	1.550.000	12	1.705.000	12	1.875.500	12	2.063.050	12	8.743.550	100,0%	60,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	28.800.000	12	11.128.500	12	12.241.350	12	13.465.485	12	14.812.034	12	80.447.369	100,0%	60,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	12	19.185.000	12	7.545.000	12	8.299.500	12	9.129.450	12	10.042.395	12	54.201.345	99,9%	60,00
8	Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor	12	13.000.000	12	8.050.000	12	8.855.000	12	9.740.500	12	10.714.550	12	50.360.050	99,7%	60,00



9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.176.000	12	4.176.000	12	4.593.600	12	5.052.960	12	5.558.256	12	23.556.816	72,4%	60,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	12	38.700.000	12	8.010.000	12	8.811.000	12	9.692.100	12	10.661.310	12	75.874.410	100,0%	60,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	12	382.490.000	12	69.700.000	12	76.670.000	12	84.337.000	12	92.770.700	12	705.967.700	99,7%	60,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	12	372.655.000	12	409.920.500	12	450.912.550	12	496.003.805	12	545.604.186	12	2.275.096.041	100%	60,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	273.017.500	100%	54.750.000	100%	60.225.000	100%	66.247.500	100%	72.872.250	100%	527.112.250	97,6%	50,00
1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	1 gedung	147.069.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.069.900	-	100,00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	224.612.500	12 bulan	24.500.000	11 bulan	26.950.000	12 bulan	29.645.000	jenis	32.609.500	34 jenis	338.317.000	-	20,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	12 bulan	8.500.000	12 bulan	6.250.000	12 bulan	6.875.000	12 bulan	7.562.500	12 bulan	8.318.750	12 bulan	37.506.250	100,0%	60,00
4	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	33.905.000	13 bulan	20.000.000	13 bulan	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	126.725.000	97,2%	60,00
5	Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	6.000.000	14 bulan	4.000.000	14 bulan	4.400.000	8	4.840.000	8	5.324.000	8	24.564.000	100,0%	60,00



No	Program / Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Realisasi 2020	Target Realisasi terhadap Renstra
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur	100%	187.920.000	100%	206.712.000	100%	227.383.200	100%	250.121.520	100%	275.133.672	100%	1.147.270.392	100,0%	60,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Jasa s pendidikan dan Pelatihan Formal aparatur Disperdagind	22 org	187.920.000	22 org	206.712.000	25 org	227.383.200	27 org	250.121.520	30 org	275.133.672	126 org	1.147.270.392	100,0%	60,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	100%	15.455.500	100%	17.000.500	100%	18.700.550	100%	20.570.605	100%	22.627.666	100%	94.354.821	99,8%	60,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Jasa Laporan Capaian Kinerja OPD	7 dok	15.455.500	7 dok	17.000.500	7 dok	18.700.550	7 dok	20.570.605	7 dok	22.627.666	35 dok	20.417.693	99,8%	60,00
V	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Perlindungan Konsumen	95%	1.352.234.000	95%	1.360.994.907	95%	1.497.094.398	95%	1.646.803.837	95%	1.811.484.221	100%	7.668.611.363	99,9%	60,00
1	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion Daerah	Terlaksananya kegiatan sidang tera - tera ulang peralatan UTTP setiap tahun	5 jenis	1.328.750.000	5 jenis	488.500.000	6 jenis	537.350.000	19 jenis	591.085.000	19 jenis	650.193.500	54 Jenis	3.595.878.500	100,0%	60,00

2	Peningkatan Pengawasan barang beredar dan pompa ukur BBM	Terselenggaranya pengawasan barang beredar dan Pompa Ukur BBM	19 Kec	23.484.000	19 Kec	872.494.907	19 Kec	959.744.397,70	19 Kec	1.055.718.837	19 Kec	1.161.290.721	19 Kec	4.072.732.863	99,8%	60,00
VI	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pengembangan pasar daerah	5 pasar	1.891.150.000,00	4 pasar	146.437.661,00	4 pasar	161.081.427,10	4 pasar	177.189.569,81	95%	194.908.526,79	100%	2.570.767.184,70	90,0%	41,65
1	Pengadaan Kontruksi sarana pasar	Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya	5 lokasi	1.831.374.500	4 lokasi	48.218.830	4 lokasi	53.040.713	4 lokasi	58.344.784	4 lokasi	64.179.263	4 lokasi	2.055.158.090	99,8%	36,84
2	Peningkatan sistem dan jaingan informasi perdagangan	Tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan	4 Kec	19.750.000	4 Kec	48.218.831	4 Kec	53.040.714	4 Kec	58.344.786	6 Kec	64.179.264	6 Kec	243.533.595	0,0%	50,00
3	Pengambilan Data dan Publikasi Informasi Perdagangan	Tersedianya Data Base Perdagangan	dok	40.025.500	1 dok	50.000.000	1 dok	55.000.000	1 dok	60.500.000	1 dok	66.550.000	5 dok	272.075.500	83,7%	60,00
VII	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah Ikm yang ditata Strukturnya	10 IKM	69.997.000,00	8 IKM	76.996.700,00	12 IKM	84.696.370,00	12 IKM	93.166.007,00	14 IKM	102.482.607,70	14 IKM	427.338.684,70	-	40,54
1	Pembinaan, keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terbinanya dan Tertatanya industri kecil dan menengah	229 desa	69.997.000	19 Kec	76.996.700	19 Kec	84.696.370	19 Kec	93.166.007	19 Kec	102.482.608	19 Kec.	427.338.685	-	40,54



No	Program / Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Realisasi 2020	Target Realisasi terhadap Renstra
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VII	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	-. industri kerajinan : 38 IKM -. Industri pangan: 6 IKM (44 IKM dari 100 IKM)	32.535.000,00	95%	35.788.500,00	95%	39.367.350,00	95%	43.304.085,00	95%	43.304.085,00	100%	1.943.154.935,00	100,0%	50,00
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terbinanya dan tertatanya kelompok IKM	9 lokasi	32.535.000	11 lokasi	35.788.500	13 lokasi	39.367.350	15 lokasi	43.304.085	15 lokasi	43.304.085	56 lokasi	1.943.154.935	100,0%	50,00
IX	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan	100 %	125.000.000,00	100%	48.218.830,00	100%	53.040.713,00	100%	58.344.784,30	100%	64.179.262,73	100%	348.783.590,03	98,5%	51,61
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang terfasilitasi	5 IKM	125.000.000	5 IKM	48.218.830	6 IKM	53.040.713	7 IKM	58.344.784	8 IKM	64.179.263	8 IKM	348.783.590	98,5%	51,61

9. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Adapun Analisis Kinerja untuk melihat pencapaian per sasaran dari 5 sasaran yang ada dalam renstra beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Umum untuk Belanja Program SKPD ini adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sumber daya Aparatur dan Terwujudnya peningkatan Laporan Capaian Kinerja Keuangan.

Sasaran ini dicapai melalui Program dan kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kab/Kota
 - **Kegiatan** Perencanaan dan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
 - **Kegiatan** Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan logistic Kantor
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Fasilitasi kunjungan tamu
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi
 - **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan**
Penyediaan jasa Surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Tabel 9

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun perencanaan	Realisasi s.d 2020	2021		Capaian (%)	Realisasi s.d 2020
				Target	Realisasi		
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	48 bulan
2	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PNS yang mengikuti Bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	7 orang	14 orang			-	14 orang
4	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikaor kinerja SKPD	7 dokumen	21 dokumen	7 Dokumen	7 dokumen	100%	35 dokumen

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri

Sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan dan pembangunan Industri :

kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Tabel 10

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun perencanaan	Realisasi s.d 2021	2021		Capaian (%)	Realisasi s.d 2021
				Target	Realisasi		
1	Cakupan Binaan	4 klpk	75	13 klpk	17 kel	%	92 klpk



Berdasarkan data dan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan cakupan binaan terhadap kelompok industri kecil dan menengah mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 demikian juga dilihat dari cakupan binaan kelompok pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari target. cakupan binaan kelompok dilakukan dalam bentuk pemberian Bantuan Hibah uang untuk usaha minyak VCO dan mebel kayu kelompok Seni Tawa di desa Hinga,

kelompok Usaha Batu Bata RIZKITA Desa Terong, Bantuan Benang bahan baku tenun kepada 14 kelompok di Desa Redontena, Adobala, Mangaaleng dan bantuan hibahh uang kepada Dekranasda Kabupaten Flores Timur serta dilakukan pendampingan pelatihan / bimtek Madu hutan, VCO dan Garam.

➤ Yang Permasalahan yang dihadapi :

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan prinsip bangga buatan sendiri / Flores Timur dan bangga buatan Indonesia, agar penumbuhan pada IKM dapat meningkatkan perekonomian dengan demikian maka anggaran berbasis kinerja dimana pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program kegiatan, sub kegiatan sehingga pelaksanaan tidak mengalami hambatan. Akan tetapi permasalahan yang paling sering dihadapi adalah permintaan dari desa/kelompok usaha untuk pelaksanaan pendampingan atau permintaan nara sumber namun tidak dianggarkan oleh Dinas dan juga kurangnya SDM Dinas sebagai nara sumber.

➤ Upaya Pemecahan dalam mengatisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis

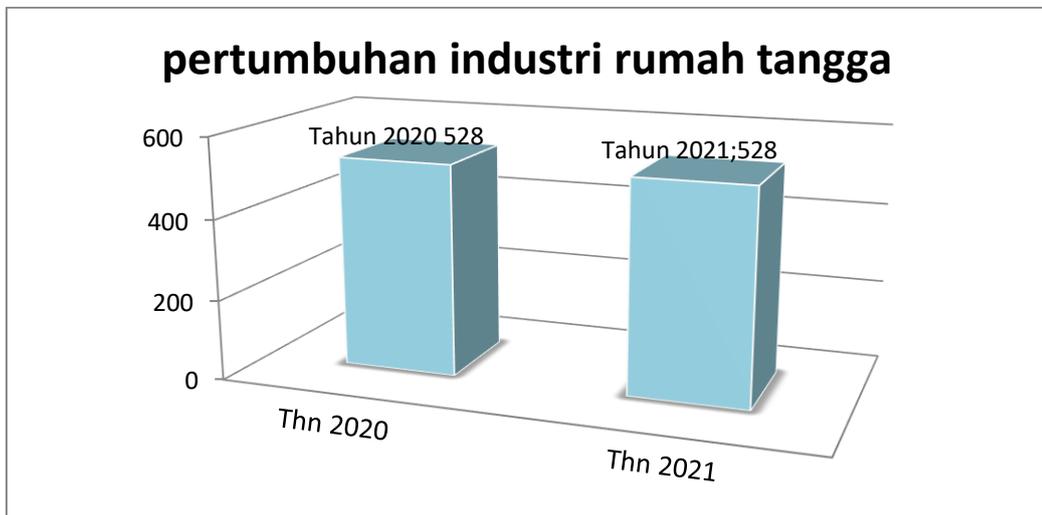
Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah Mengusulkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah sehingga kedepannya dapat dilakukan peningkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri melalui tenaga SDM yang terampil, Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dengan menitikberakan pada IKM dan peran serta masyarakat dalam tercapainya pelayanan teknologi industri,

Sasaran 2. Mendorong tumbuh berkembangnya industri rumah tangga (home industri) sebagai bagaian integral pemberdayaan ekonomi rakyat

Sasaran ini dicapai melalui Program Penataan Struktur Industri, didukung oleh kegiatan Pembinaan Keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir, namun di tahun 2021 program keg ini tidak dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.

Tabel 11
Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun perencanaan	Realisasi s.d 2019	2021		Capaian (%)	Realisasi s.d 2021
				Target	Realisasi		
1	Prosentase pertumbuhan industri rumah tangga (Home Industri)	5 IKM	528 IKM	-	-	-	528 IKM



- Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 sasaran ke II Tidak mengalami peningkatan pertumbuhan industri rumah tangga, hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2021 tidak ada dukungan pendanaan pada program kegiatan untuk mendukung sasaran ini akibat pandemic covid 19

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis

Diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pendanaan untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan industri rumah tangga.

Sasaran 3. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan yang layak dan bersih bagi pedagang kecil dan tradisional

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Tabel 12

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun percanaan	Realisasi s.d 2020	2021		Capaian (%)	Realisasi s.d 2020
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Pasar daerah / desa Industri)	4 unit	176 unit	1 unit	-	-	176 unit



Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 sasaran ke III capaian kinerjanya 0 %. Pada tahun 2021 target 1 lokasi pasar yang akan dibenahi sarana dan prasarannya, yaitu Pembangunan Rabat jalan pasar Waiwerang namun sampai pada akhir TA 2021 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran. Sehingga pada tahun 2021 tidak ada peningkatan jumlah pasar daerah yang diperbaharui/direvitalisasi.

➤ Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis

Pelaksanaan pembangunan kontruksi sarana pasar TA 2021 tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid 19 sehingga aktifitas pembangunan fisik bidang pasar di Kabupaten Flores Timur tidak dilaksanakan.

➤ Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengajukan usulan pendanaan kepada Pemerintah Daerah agar di tahun anggaran berikutnya kegiatan yang tertunda dapat dilaksanakan demi menjawab tuntutan masyarakat terhadap fasilitas gedung pasar dan sarana penunjang lainnya yang bersih lengkap dan layak.

Sasaran 4. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Barang Terhadap Pelaku Usaha

Sasaran ini dicapai melalui Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen, kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, tera ulang dan pengawasan.

Tabel 13

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian awal tahun perencanaan	Realisasi s.d 2021	2021		Capaian (%)	Realisasi s.d 2021
				Target	Realisasi		
1	Cakupan pengawasan perlindungan konsumen	95%	122%	100%	-	0	122%



Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 sasaran ke IV capaian kerjanya sampai dengan tahun 2021 masih sama dengan tahun lalu tidak mengalami peningkatan karena pada tahun 2021 tidak ada ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sidang tera tera ulang.

Diharapkan pada tahun tahun mendatang Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menunjang terlaksananya kegiatan sidang tera tera ulang agar dapat terjangkau seluruh potensi peralatan UTTP yang ada.

10. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Presentase sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Presentase biaya} = 100 \% \left\{ \frac{\text{Rp.3.223.622.264,-}}{\text{Rp. 3.916.384.583,-}} \times 100\% \right\}$$

Rp. 18 %

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program kegiatan adalah Rp. 3.223.622.264,- sementara target biaya untuk semua program Rp. 3.916.384.583,- dengan menggunakan rumus efisiensi maka diperoleh presentase efisiensi biaya pada level program adalah 18 %. Presentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil , sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan

sumber daya biaya. Namun dilihat dari level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya kemetrolgian (tenaga Penerima) pada kegiatan yaitu Operasionalisasi pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah.

Selain penggunaan sumber daya biaya dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sarana transportasi roda 4 (empat) dan 2 (dua) juga sangat mendukung kegiatan rutin dan teknis bidang kemetrolgian. Sarana transportasi yang dimiliki adalah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua baik yang diterima dari Dana Alokasi Umum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Data Sarana Transportasi/Kendaraan Dinas
Dinas Perdagangan Kabupaten Flores Timur

No	Jenis	Jml	Merk	Kondisi	Ket
1	Kendaraan roda 4	1	Toyota Inova	Baik	DAU
2	Kendaraan roda 4	1	Suzuki APV megacari	Baik	DAK
3	Kendaraan roda 4	1	Toyota H-Lux Tipe E	Baik	DAK
4	Kendaraan roda 2	4	Honda Revo	Baik	DAU

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

Target : Rp.24.990.000,-

Realisasi : Rp. 24.989.000,-

Sisa : Rp.1000,-

Output : Tersedianya Jasa Laporan Kinerja dan Keuangan

Outcomes : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target	: Rp.1.644.409.838,-
Realisasi	: Rp.1.547.946.497,-
Sisa	: Rp.196.463.341,
Output	: Tersedianya Gaji tunjangan ASN
Outcomes	: Terpenuhinya Gaji tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Target	: Rp.47.400.000,-
Realisasi	: Rp.46.920.000,-
Sisa	: Rp.480.000,-
Output	: Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Outcomes	: Terpenuhinya Kebutuhan Jasa administrasi Keuangan

.3. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Target	: Rp.3.194.745,-
Realisasi	: Rp.3.194.475,-
Sisa	: Rp.-,
Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Outcomes	: Terpebuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2. Penyediaan Logistik Kantor

Target	: Rp.15.667.000,-
Realisasi	: Rp.15.667.000,-
Sisa	: Rp.-
Output	: Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya jasa kebersihan dan tersedianya peralatan kantor.
Outcomes	: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Meningkatkan Pelayanan Kebersihan kantor Tersedianya Peralatan Kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target	: Rp.8.093.600,-
Realisasi	: Rp.8.093.600,-
Sisa	: Rp.-,
Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcomes	: Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan

4. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan perundang Undangan

Target	: Rp.600.000,-
Realisasi	: Rp.600.000,-
Sisa	: Rp.-,
Output	: Tersedianya Bahan bacaan (Pos Kupang)
Outcomes	: Terpenuhinya Kebutuhan akan Informasi bacaan dan peraturan perundang-undangan

5. Fasilitasi Kunjungan tamu

Target	: Rp.8.000.000,-
Realisasi	: Rp.8.000.000,-
Sisa	: Rp.-,
Output	: Tersedianya makan dan minum tamu
Outcomes	: Terpenuhinya makanan dan minuman untuk pegawai tamu dan rapat

6. Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target	: Rp.63.000.000,-
Realisasi	: Rp.62.962.600,-
Sisa	: Rp.37.400,-
Output	: Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
Outcomes	: Meningkatnya koordinasi dan konsultasi prog/kegiatan dalam dan luar daerah

1.3. Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Target	: Rp.1.860.000,-
Realisasi	: Rp.1.357.000,-
Sisa	: Rp.503.000,-
Output	: Tersedianya jasa surat menyurat
Outcomes	: Meningkatnya jasa Pelayanan surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Target : Rp.1.644.409.838,-
 Realisasi : Rp.1.547.946.497,-
 Sisa : Rp.196.463.341,
 Output : Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
 Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, penerangan listrik dan air bersih untuk kantor
3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- Target : Rp.332.350.000,-
 Realisasi : Rp.330.950.000,-
 Sisa : Rp.1.400.000,
 Output : Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran
 Outcomes : Meningkatnya Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan

- Target : Rp.37.145.900,-
 Realisasi : Rp.35.905.590,-
 Sisa : Rp.1.240.310,-
 Output : Kendaraan Dinas yang dilayani dan terpeliharanya kendaraan Dinas
 Outcomes : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dnas operasional

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

- Target : Rp. 7.501.000,-
 Realisasi : Rp. 7.501.000,-
 Sisa : Rp. -
 Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
 Outcomes : Terpeliharanya Gedung kantor

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

- Target : Rp. 4.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.000.000,-
 Sisa : Rp.
 Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
 Outcomes : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Belanja Urusan Perindustrian

Sasaran yang akan capai untuk Belanja Urusan perindustrian ini adalah :
Meningkatnya IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

6.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat

Target	: Rp 225.680.000,-
Realisasi	: Rp. 225.674.262,- (100%)
Sisa	: Rp. 5.738,-
Output	: Jumlah IKM yang Terfasilitasi, Terbina dan Tertatanya Kelompok IKM, Tercapainya Pelayanan Teknologi Industri, Jumlah IKM yang ditata strukturnya
Outcomes	: Terfasilitasinya IKM Meningkatnya Pembinaan dan Penataan Kelompok IKM

Belanja Urusan Perdagangan

Sasaran yang akan capai untuk Belanja Urusan Perdagangan ini adalah
Meningkatnya Sarana Perdagangan Yang Layak Dan Bersih Bagi Pedagang Kecil
Dan Tradisional. Sasaran ini dicapai melalui Program dan kegiatan:

I. Program Peningkatan Sarana Distribusi

1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan

Target	: Rp. 3.900.000,-
Realisasi	: Rp. 3.900.000,- (100%)
Sisa	: Rp.,-
Output	: Tersedianya Gedung pasar dan sarana penunjang lainnya
Outcomes	: Terpenuhinya fasilitas gedung pasar dan sarana penunjang lainnya yang bersih lengkap dan nyaman.

1.2. Pembinaan Terhadap Pengelola Saran Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Target	: Rp. 24.801.000,-
Realisasi	: Rp. 24.074.800.- (97,1%)
Sisa	: Rp. 726.200,-
Output	: Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi
Outcomes	: Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infor- masi perdagangan

II. Program Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1.1. Pengendalian Harga stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku saha Distribusi Barang Dalam Satu Kabupaten

1. Pemantauan Harga stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku saha Distribusi Barang Dalam Satu Kabupaten

Target	: Rp. 1.327.891.500,-
Realisasi	: Rp. 748.303.500,- (56,4%)
Sisa	: Rp.,579.589.000,-
Output	: Tersedianya Bahan kebutuhan Pokok dan bahan strategis lainnya
Outcomes	: Terpenuhinya kebutuhan Pokok dan bahan strategis lainnya

III. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1.2. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Peningkatan Sistem dan Jaringan informasi

Target	: Rp. 19.450.000,-
Realisasi	: Rp. 18.450.000,- (94,9%)
Sisa	: Rp.,1.000.000,-
Output	: Tersedianya system dan Jaringan informasi perdagangan
Outcomes	: Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi perdagangan

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Barang dan Tertib Ukur Terhadap Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Sasaran ini dicapai melalui Program dan kegiatan:

I. Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen

1.1. Pelaksanaan Metrologi Lega, Berupa Tera-Tera Ulang dan Pengawasan

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan

Target	: Rp. 41.030.000,-
Realisasi	: Rp. 40.531.400,- (98,8%)
Sisa	: Rp.,498.600,-
Output	: Terselenggaranya sidang tera tera ulang peralatan UTTP setiap tahun
Outcomes	: UTTP yang legal dan terukur

II. Program Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 1.1. Menjamin Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah kabupaten
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- | | |
|-----------|---|
| Target | : Rp. 51.353.500,- |
| Realisasi | : Rp. 51.348.500,- (100%) |
| Sisa | : Rp. 5.000,- |
| Output | : Terlaksananya pengawasan terhadap barang beredar |
| Outcomes | : Terawasinya produk atau barang beredar kadaluarsa di masyarakat |

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 memuat Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 1 tahun yang dituangkan 4 target sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 ini diharapkan kedepannya dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang lebih baik dan transparant pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan melibatkan segenap stacholder.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Setiap keberhasilan yang dicapai merupakan cermin telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja para pegawai yang dapat membawa dampak terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun hambatan / kendala dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan juga menemui sejumlah kendala yang dapat meghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut akan dapat diatasi apabila dicari jalan keluar atau solusinya.

Hal yang menjadi penyebab utama belum tercapainya tingkat kinerja sesuai yang diharapkan adalah Kegiatan teknis bidang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari recofusing anggaran terkait pandemi COVID 19,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini dibuat, demi kesempurnaan laporan ini, maka segala saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menuju Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa membangun Kota Menata “.

Larantuka, Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Flores Timur

Siprianus Sina Ritan, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701231 199003 1 056

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan Strategis yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 memuat Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 1 tahun yang dituangkan 4 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan program ataupun sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dan kendala . Pelaksanaan hasil yang telah dicapai ditahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun yang akan datang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Setiap keberhasilan yang dicapai merupakan cermin telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja para pegawai yang dapat membawa dampak terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun hambatan / kendala dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan juga menemui sejumlah kendala yang dapat meghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut akan dapat diatasi apabila dicari jalan keluar atau solusinya.

Hal yang menjadi penyebab utama belum tercapainya tingkat kinerja sesuai yang diharapkan adalah Kegiatan teknis bidang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari refofusing anggaran terkait pandemi COVID 19, Dalam melakukan proses pendataan khusus urusan perdagangan petugas seringkali mengalami kendala dimana pihak pelaku usaha yang keberatan memberikan data yang sebenarnya dan masih terbatasnya sarana Mobilitas dan Sarana Penunjang lainnya.

Demikian laporan ini dibuat, diharapkan dapat digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan intropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk melakukan pembenahan dan perbaikan ditahun yang akan datang.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Flores Timur

Siprianus Sina Ritan, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199003 1 056